



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.234, 2020

KEMENAKER. Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
Tahun Anggaran 2020.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk melaksanakan Tugas Pembantuan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2020 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 4

Program, kegiatan, dan anggaran Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Alokasi dana dan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan; dan
- c. koordinasi pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Dana Tugas Pembantuan wajib membuat:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang dan jasa yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 8

Bupati/walikota dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan berpedoman pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Tugas Pembantuan harus ditatausahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada pemerintah pusat dan melaksanakan fungsi terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

| PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.000) |
|---|--|----------------------|
| PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA | Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri | 48.694.800 |
| | Padat Karya Infrastruktur | 15.028.000 |
| | Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan | 5.438.650 |
| | Total | 69.161.450 |

-7-

MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL PAKET | TOTAL ADMINISTRASI (RP) (000) | TOTAL ANGGARAN KESELURUHAN (RP) (000) |
|-----|--|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| | | PAKET | Jumlah (RP) (000) | PAKET | Jumlah (RP) (000) | | | |
| | BARAT | 240 | 23.296.000 | 80 | 8.840.000 | 320 | 2.725.380 | 36.861.380 |
| I | PROVINSI ACEH | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| 1 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| II | PROVINSI SUMATERA UTARA | 7 | 737.800 | 5 | 552.500 | 12 | 129.780 | 1.420.080 |
| 2 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 64.890 | 823.090 |
| 3 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal | 4 | 421.600 | 1 | 110.500 | 5 | 64.890 | 596.990 |
| III | PROVINSI SUMATERA BARAT | 4 | 421.600 | 1 | 110.500 | 5 | 64.890 | 596.990 |
| 4 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasaman | 4 | 421.600 | 1 | 110.500 | 5 | 64.890 | 596.990 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN |
|------|---|-----|-----------|-------------|---------|-------|--------------------|----------------|
| IV | PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Belitung Timur | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| V | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 64.890 | 591.890 |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Lingga | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 64.890 | 591.890 |
| VI | PROVINSI RIAU | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| 7 | Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| VII | PROVINSI SUMATERA SELATAN | 24 | 2.529.600 | 5 | 552.500 | 29 | 259.560 | 3.341.660 |
| 8 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat | 7 | 737.800 | - | - | 7 | 64.890 | 802.690 |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu | 7 | 737.800 | 1 | 110.500 | 8 | 64.890 | 913.190 |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 7 | 737.800 | - | - | 7 | 64.890 | 802.690 |
| 11 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyuasin | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 64.890 | 823.090 |
| VIII | PROVINSI LAMPUNG | 25 | 2.635.000 | 6 | 663.000 | 31 | 259.560 | 3.557.560 |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus | 2 | 210.800 | 2 | 221.000 | 4 | 64.890 | 496.690 |
| 13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah | 7 | 737.800 | 1 | 110.500 | 8 | 64.890 | 913.190 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN |
|-----|---|-----|-----------|-------------|-----------|-------|--------------------|----------------|
| 14 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji | 8 | 843.200 | 1 | 110.500 | 9 | 64.890 | 1.018.590 |
| 15 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| IX | PROVINSI JAMBI | 6 | 632.400 | 8 | 884.000 | 14 | 129.780 | 1.646.180 |
| 16 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Merangin | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 64.890 | 823.090 |
| 17 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kerinci | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 64.890 | 823.090 |
| X | PROVINSI BENGKULU | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| 18 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| XI | PROVINSI BANTEN | 6 | 632.400 | - | - | 6 | 129.780 | 762.180 |
| 19 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak | 3 | 316.200 | - | - | 3 | 64.890 | 381.090 |
| 20 | Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan | 3 | 316.200 | - | - | 3 | 64.890 | 381.090 |
| XII | PROVINSI JAWA BARAT | 31 | 3.267.400 | 13 | 1.436.500 | 44 | 324.450 | 5.028.350 |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 64.890 | 823.090 |
| 22 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| 23 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN |
|------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------|--------------------|----------------|
| 24 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| 25 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi | 6 | 632.400 | 2 | 221.000 | 8 | 64.890 | 918.290 |
| XIII | PROVINSI DIY YOGYAKARTA | 4 | 421.600 | 1 | 110.500 | 5 | 64.890 | 596.990 |
| 26 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul | 4 | 421.600 | 1 | 110.500 | 5 | 64.890 | 596.990 |
| XIV | PROVINSI JAWA TENGAH | 60 | 6.324.000 | 23 | 2.541.500 | 83 | 648.900 | 9.514.400 |
| 27 | Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 64.890 | 591.890 |
| 28 | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 64.890 | 1.129.090 |
| 29 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemasangan | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 64.890 | 591.890 |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| 31 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| 32 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| 33 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| 34 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Jepara | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| 35 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN |
|-------|---|-----|------------|-------------|-----------|-------|--------------------|----------------|
| 36 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| XV | PROVINSI JAWA TIMUR | 19 | 2.002.600 | 6 | 663.000 | 25 | 194.670 | 2.860.270 |
| 37 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang | 7 | 737.800 | - | - | 7 | 64.890 | 802.690 |
| 38 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| 39 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto | 6 | 632.400 | 3 | 331.500 | 9 | 64.890 | 1.028.790 |
| XVI | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 17 | 1.791.800 | 4 | 442.000 | 21 | 194.670 | 2.428.470 |
| 40 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi | 7 | 737.800 | - | - | 7 | 64.890 | 802.690 |
| 41 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 64.890 | 823.090 |
| 42 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang | 7 | 737.800 | - | - | 7 | 64.890 | 802.690 |
| | TENGAH | 153 | 16.126.200 | 37 | 4.088.500 | 190 | 1.737.360 | 21.952.060 |
| XVII | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 72.390 | 599.390 |
| 43 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 72.390 | 599.390 |
| XVIII | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 72.390 | 830.590 |
| 44 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 72.390 | 830.590 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN |
|------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------|--------------------|----------------|
| XIX | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 72.390 | 830.590 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 72.390 | 830.590 |
| XX | PROVINSI GORONTALO | 15 | 1.581.000 | 4 | 442.000 | 19 | 144.780 | 2.167.780 |
| 46 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 72.390 | 1.136.590 |
| 47 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwatu | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |
| XXI | PROVINSI SULAWESI BARAT | 14 | 1.475.600 | 2 | 221.000 | 16 | 144.780 | 1.841.380 |
| 48 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majene | 7 | 737.800 | - | - | 7 | 72.390 | 810.190 |
| 49 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |
| XXII | PROVINSI SULAWESI SELATAN | 42 | 4.426.800 | 12 | 1.326.000 | 54 | 434.340 | 6.187.140 |
| 50 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |
| 51 | Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |
| 52 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |
| 53 | Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN |
|-------|--|-----|-----------|-------------|---------|-------|--------------------|----------------|
| 54 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wajo | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |
| 55 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pare-Pare | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 72.390 | 1.031.190 |
| XXIII | PROVINSI SULAWESI TENGAH | 10 | 1.054.000 | - | - | 10 | 144.780 | 1.198.780 |
| 56 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 72.390 | 599.390 |
| 57 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong | 5 | 527.000 | - | - | 5 | 72.390 | 599.390 |
| XXIV | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 43 | 4.532.200 | 4 | 442.000 | 47 | 434.340 | 5.408.540 |
| 58 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana | 8 | 843.200 | 1 | 110.500 | 9 | 72.390 | 1.026.090 |
| 59 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Utara | 8 | 843.200 | 1 | 110.500 | 9 | 72.390 | 1.026.090 |
| 60 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe | 8 | 843.200 | 1 | 110.500 | 9 | 72.390 | 1.026.090 |
| 61 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan | 8 | 843.200 | 1 | 110.500 | 9 | 72.390 | 1.026.090 |
| 62 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna | 3 | 316.200 | - | - | 3 | 72.390 | 388.590 |
| 63 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Kendari | 8 | 843.200 | - | - | 8 | 72.390 | 915.590 |
| XXV | PROVINSI SULAWESI UTARA | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 72.390 | 830.590 |
| 64 | Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sangihe | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 72.390 | 830.590 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | | PADAT KARYA | | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN |
|--------|---|-----|-----------|-------------|-----------|-------|--------------------|----------------|
| XXVI | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 15 | 1.581.000 | 3 | 331.500 | 18 | 144.780 | 2.057.280 |
| 65 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Barat | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 72.390 | 1.136.590 |
| 66 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah | 7 | 737.800 | 1 | 110.500 | 8 | 72.390 | 920.690 |
| | TIMUR | 69 | 7.272.600 | 19 | 2.099.500 | 88 | 975.910 | 10.348.010 |
| XXVII | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 32 | 3.372.800 | 9 | 994.500 | 41 | 386.950 | 4.754.250 |
| 67 | Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka | 7 | 737.800 | 1 | 110.500 | 8 | 77.390 | 925.690 |
| 68 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Manggarai Barat | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 77.390 | 1.141.590 |
| 69 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo | 7 | 737.800 | 1 | 110.500 | 8 | 77.390 | 925.690 |
| 70 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rote Ndao | 7 | 737.800 | 1 | 110.500 | 8 | 77.390 | 925.690 |
| 71 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ende | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 77.390 | 835.590 |
| XXVIII | PROVINSI MALUKU UTARA | 12 | 1.264.800 | - | - | 12 | 243.240 | 1.508.040 |
| 72 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah | 4 | 421.600 | - | - | 4 | 81.080 | 502.680 |
| 73 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan | 4 | 421.600 | - | - | 4 | 81.080 | 502.680 |

| NO. | KABUPATEN/KOTA | TKM | PADAT KARYA | TOTAL | TOTAL ADMINISTRASI | TOTAL ANGGARAN | | |
|-------|--|-----|-------------|-------|--------------------|----------------|-----------|------------|
| 74 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Tengah | 4 | 421.600 | - | - | 4 | 81.080 | 502.680 |
| XXIX | PROVINSI MALUKU | 14 | 1.475.600 | 4 | 442.000 | 18 | 162.160 | 2.079.760 |
| 75 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulau Buru | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 81.080 | 1.039.880 |
| 76 | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tengah | 7 | 737.800 | 2 | 221.000 | 9 | 81.080 | 1.039.880 |
| XXX | PROVINSI PAPUA | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 91.780 | 849.980 |
| 77 | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asmat | 3 | 316.200 | 4 | 442.000 | 7 | 91.780 | 849.980 |
| XXXI | PROVINSI PAPUA BARAT | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 91.780 | 1.155.980 |
| 78 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Selatan | 8 | 843.200 | 2 | 221.000 | 10 | 91.780 | 1.155.980 |
| TOTAL | | 462 | 48.694.800 | 136 | 15.028.000 | 598 | 5.438.630 | 69.161.450 |

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIC INDONESIA,

td

IDA FAUZIYAH